

Historiografi Indonesiasentris: problematika dan tantangan

Moch. Dimas Galuh Mahardika^{1*}, Danan Tricahyono², Erisya Pebrianti Pratiwi³, Fahmi Nur Ramadhan⁴.

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57125 Indonesia, dimas.dg20@gmail.com

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57125 Indonesia, danancahyono2@gmail.com

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57125 Indonesia, erisya27@student.uns.ac.id

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57125 Indonesia, fahminr11@gmail.com

*Corresponding email: dimas.dg20@gmail.com

Abstract

The historical journey of the Indonesian nation needs to be written in its entirety that accommodates various perspectives in order to instill national identity. De-colonization is an attempt to dismantle something colonial, and accentuate something more national or at least 'different' from the colonial. In doing this work there are several problems and challenges that must be faced in order to be able to formulate a complete narrative of Indonesian history by pivoting to nationality. Various efforts have been made to formulate this goal such as, for example, Seminar Sedjarah Nasional 1957 which is considered as the initial milestone of Indonesian historiography. The ideas that appear in the forum are a form of seriousness in formulating Indonesian historiography. Some internal problems post-independence also coloring the pattern of Indonesian historiography.

Keywords

Historiography; History of Indonesia

Abstrak

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia perlu ditulis secara utuh yang mengakomodir berbagai perspektif dalam rangka menanamkan identitas nasional. De-kolonisasi merupakan suatu usaha untuk membongkar sesuatu yang kolonial, dan menonjolkan sesuatu yang lebih bersifat nasional atau paling tidak 'berbeda' dari yang kolonial. Di dalam melakukan pekerjaan ini terdapat beberapa problem dan tantangan yang harus dihadapi untuk dapat merumuskan narasi sejarah Indonesia yang utuh dengan berporos pada nasionalitas. Berbagai usaha telah dilakukan untuk merumuskan tujuan ini seperti misalnya, Seminar Sedjarah Nasional 1957 yang dianggap sebagai tonggak awal historiografi Indonesia. Berbagai gagasan yang muncul dalam forum tersebut merupakan bentuk keseriusan dalam merumuskan historiografi Indonesia. Beberapa problem internal pasca kemerdekaan turut mewarnai corak historiografi Indonesia.

Kata kunci

Historiografi; Sejarah Indonesia

*Received: 19 April 2021

*Revised: 4 October 2021

*Accepted: 29 October 2021

*Published: 30 October 2021

Pendahuluan

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia menghasilkan banyak produk kebudayaan baik produk material maupun imaterial. Salah satu produk perjalanan sejarah bangsa ini adalah catatan peristiwa yang mengandung berbagai perspektif dalam kurun waktu tertentu. Mulai masa kuno, bangsa kita sudah mengabadikan beberapa peristiwa penting dalam bentuk prasasti dan beberapa kitab yang dianggap mengandung muatan kronik. Era berikutnya ketika masa kerajaan-kerajaan Islam mulai eksis, mereka juga memiliki cara penulisan sendiri yang dituangkan dalam bentuk babad, hikayat dan berbagai peninggalan tertulis lain. Masuk pada era kolonial, corak penulisan dan perspektif memiliki ciri khas tersendiri. Secara umum, Kartodirdjo (2014) mengklasifikasi beberapa corak penulisan sejarah dari masa ke masa. Corak penulisan sejarah di Indonesia terbagi dalam beberapa fase, pertama historiografi tradisional, historiografi kolonial, serta historiografi modern. Historiografi tradisional ditulis untuk kepentingan-kepentingan raja seperti babad, hikayat, silsilah. Sebagian besar historiografi tradisional memuat tindakan-tindakan tidak dari manusia, tetapi dari dewa-dewa, merupakan teogoni dan kosmogoni yang menerangkan kekuatan-kekuatan alam dan mempersonifikasikan sebagai dewa. Historiografi kolonial ditulis ketika bangsa Indonesia mengalami kolonisasi oleh bangsa barat, utamanya pada periode kolonisasi orang-orang Belanda. Pasca-kolonial, mulailah dibicarakan soal-soal tentang penulisan sejarah Indonesia yang 'Indonesia', atau dapat diistilahkan sebagai de-kolonisasi historiografi Indonesia untuk menonjolkan 'indonesiasentris' di dalam muatan tulisannya.

Proyek de-kolonisasi ini menggambarkan keinginan untuk membongkar sesuatu yang kolonial, dan menonjolkan sesuatu yang lebih bersifat nasional atau paling tidak 'berbeda' dari yang kolonial. Keseriusan dalam merumuskan historiografi Indonesiasentris ini ditegaskan kembali dengan diselenggarakannya Seminar Sedjarah Nasional I yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada 63 tahun silam, tepatnya pada tahun 1957 (Kuntowijoyo, 2008). Dalam seminar tersebut, banyak tokoh yang turut berkontribusi untuk merumuskan penulisan sejarah Indonesiasentris. Termasuk yang menjadi sorotan utama adalah ketika gagasan Muh.Yamin yang berbenturan dengan pemikiran Soedjatmoko seputar filsafat sejarah nasional seperti apa yang harus dibangun terlebih dahulu? Terlepas dari benturan perbedaan pemikiran keduanya, perbincangan soal tema besar historiografi Indonesiasentris ini masih hangat dan tetap relevan dari waktu ke waktu. Ditambah lagi ketika Purwanto, (2008) menulis tentang "Gagalnya Historiografi Indonesiasentris" yang kemudian menambah panjang agenda diskusi tentang tema besar historiografi ini. Mungkin kurang afdol ketika berbicara soal de-kolonisasi historiografi Indonesia tanpa membaca tulisan Nordholt (2004).

Dalam tulisan itu, kita akan mendapatkan gambaran tentang beberapa ide dan wacana berikut dengan problematika di dalam narasi sejarah Indonesia pasca kolonial. Ketika penulisan sejarah Indonesia diusahakan untuk memunculkan sesuatu yang sifatnya nasional, tantangan berikutnya adalah perosalan sumber. Sumber-sumber yang tersedia

baik berupa arsip dan catatan lainnya masih didominasi oleh berbagai tulisan dari “pihak sana”; orang-orang Belanda. Namun tantangan tersebut tidak menghentikan proyek dekolonisasi historiografi ini. Buktinya, apabila mencermati tulisan Ali (2005) kita akan menemukan sebuah ambisi intelektual yang luar biasa tentang bagaimana seharusnya menulis sejarah Indonesia. Tentu di dalam memahami semangat itu kita juga perlu untuk tetap berpegang pada unsur-unsur metodik dan etika kepenulisan sejarah untuk meminimalisir apa yang disebut sebagai subjektifitas sejarah. Peralnya, dalam buku tersebut subjektifisme-ideologis masih tampak dominan. Terlepas dari unsur subjektifitas tersebut, setidaknya Ali sudah memberikan kontribusi besar dalam ide penulisan sejarah Indonesia yang utuh dan bersifat nasional. Unsur nasionalitas memang dianggap perlu di dalam menuliskan narasi sejarah dengan tujuan tidak lain adalah untuk memberikan penanaman identitas sebagai sebuah bangsa (Epstein, 2009).

Dalam artikel ini kita akan membahas seputar persoalan de-kolonisasi historiografi Indonesia dan berbagai wacana di dalamnya. Pada dasarnya, sejarah memang ditulis dengan serba kepentingan, salah satunya adalah kepentingan sang penulis itu sendiri (Kuntowijoyo, 2005). Persoalan kepentingan politik, golongan dan universalitas sejarah akan tampak pada narasi sejarah periode pasca kolonial ini. Periode ini menunjukkan adanya corak persoalan dalam narasi sejarah kita. Adanya kepentingan golongan yang mendominasi penafsiran sejarah sampai pada hilangnya peran kolektifitas. Sebelum jauh berbicara tentang tema pokok dalam tulisan ini, alangkah lebih baik jika kita membahas seputar sejarah dan masa lalu itu sendiri beserta konten yang selalu hadir di dalamnya yakni subjektifitas, kebenaran, dan objektifitas.

Bagi masyarakat awam sejarah adalah informasi, bagi seorang akademisi sejarah adalah sebuah pengetahuan (Heater, 2003). Kadangkala banyak orang menganggap bahwa semua sejarah adalah masa lalu. Anggapan semacam ini sudah menjadi hal yang biasa dalam pandangan masyarakat kita mengenai sejarah. Pengertian tentang sejarah yang sesungguhnya kemudian perlu disosialisasikan kembali untuk memberikan pemahaman yang konkrit mengenai sejarah itu sendiri. Tidak semua masa lalu adalah sejarah. Sejarah merupakan masa lalu yang ditulis ulang oleh seseorang, atau dalam bidang keilmuan terkait biasa disebut sebagai sejarawan (Holland, 1985). Masa lalu tidak bisa menampilkan dirinya sendiri, ia perlu dimunculkan kembali dalam bentuk sebuah narasi dan narasi itulah yang kemudian disebut sebagai sejarah. Dalam menulis narasi sejarah, seorang sejarawan memanfaatkan bukti-bukti peninggalan dari peristiwa terkait sebagai bahan materil dasar. Seperti apa yang diungkapkan oleh Carr (2018) bahwa fakta-fakta masa lalu tidak dapat berbicara sendiri sebelum diolah dan ditafsirkan oleh sejarawan.

Penjelasan tersebut terang menjelaskan bahwa sejarah adalah hasil olah pikir dari akal-budi manusia. Tentu saja ini menyiratkan bahwa di dalam sejarah tetap memiliki sifat subjektifitas yang dihasilkan oleh aktifitas sejarawan dalam menafsirkan masa lalu. Kemudian dalam konteks “kebenaran” dan “objektifitas”, agaknya kita perlu mengoreksi kembali pemahaman kita seputar dua hal tersebut. Kebenaran dan objektifitas di dalam

sejarah tidak dapat diposisikan sejajar. Sejarah tidak bisa menampilkan sesuatu secara apa adanya secara persis (Murphey, 2009). Tidak ada sesuatu yang benar sepenuhnya di dalam sejarah. Sedangkan objektivitas merupakan salah satu sifat yang diukur dari unsur metodis penulisan sejarah itu sendiri. Objektif yang dimaksud adalah ketika sejarah ditulis sesuai dengan metode dan penafsirannya didasarkan pada bukti-bukti yang otentik (Frederick & Soeroto, 2017). Kembali kepada penjelasan sebelumnya, bahwa interpretasi memiliki unsur subjektivitas. Maka di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa objektivitas dan subjektivitas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah itu sendiri. Hanya saja subjektivitas harus tetap dibatasi dengan fakta-fakta yang ditemukan dari sumber yang telah digunakan supaya narasi sejarah dapat “mendekati objektif”.

Pada pembahasan berikutnya kita akan melihat narasi sejarah yang serba subjektif dengan konten-konten yang beragam. Mulai dari narasi orang-orang besar yang masih tampak pada narasi sejarah, hilangnya peran komunitas masyarakat, sampai pada penokohan seseorang demi kepentingan politik dan legitimasi kekuasaan. Narasi semacam ini akan menjadi berbahaya apabila terus menerus diberikan kepada publik, karena dalam hal ini kepentingan politik dengan memonopoli tafsiran sejarah tidak selalu sejalan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ada kemungkinan narasi yang dilebih-lebihkan, ada peran penokohan yang sebenarnya tidak terlalu berperan dalam peristiwa masa lalu yang dimaksud. Maka hal-hal semacam ini yang kemudian menjadi problem dalam narasi sejarah Indonesia periode pasca-kolonial.

Metode

Artikel ini merupakan hasil telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Studi pustaka merupakan salah satu pendekatan yang dianggap sesuai dan mudah untuk menceritakan tema yang diperbincangkan oleh penulis. Zed (2004) menjelaskan beberapa ciri penelitian pustaka di antaranya: (a) penulis berhadapan langsung dengan sumber. Penulis mengumpulkan sumber berupa buku dan jurnal ilmiah yang dianggap sesuai dengan pembahasan; (b) sumber bersifat siap pakai. Kemudahan dalam mengakses sumber menjadi penting karena dalam penelitian pustaka sumber teks menjadi bahan utama; (c) sumber yang digunakan umumnya merupakan sumber skunder, hasil penelitian baik berupa buku maupun jurnal ilmiah. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena hasil kajian dan telaah penulis terhadap sumber-sumber yang didapatkan berupa narasi yang menceritakan tentang pembahasan terkait.

Hasil dan Pembahasan

Fondasi Intelektual Indonesiasentris

Kolonialisme yang bercokol selama beberapa abad di Indonesia memberikan dampak ke dalam sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Kontrol penuh atas kehidupan masyarakat bumiputera mendegradasi karakter orang-orang bumiputera itu

sendiri yang sebelum kedatangan orang-orang Eropa sudah memiliki tingkat peradaban yang tinggi, baik dari segi kebudayaan maupun etika kehidupan (Lubis, 2013). Belum lagi ketika sistem kolonial menciptakan strata sosial dengan menempatkan posisi masyarakat bumiputera pada kasta yang paling bawah. Tentunya ini menjadi polarisasi yang tidak menguntungkan bagi masyarakat pribumi. Dalam kehidupan sosial, seolah-olah tidak memiliki arah tujuan hidup yang mandiri. Kenyataan sosial ini pada satu sisi menguntungkan pihak kolonial secara materil, dan pada sisi yang lain secara langsung menyingkirkan peran masyarakat bumiputera dalam narasi sejarah. Sehingga narasi sejarah yang dibangun pada masa kolonial atau historiografi kolonial ini sangat kental dengan apa yang disebut sebagai perspektif nerlandosentris.

Van Leur, seorang sosiolog Webberian mencoba untuk melakukan kritik terhadap narasi-narasi kolonial yang dianggap terlalu sentralistik. Van Leur mencoba menggunakan pendekatan sosiologi di dalam melakukan analisa seputar masyarakat bumiputera (Nordholt, 2004). Ia mencoba untuk mencari hubungan-hubungan antara kekuatan politik dengan praktik hegemoni kebudayaan yang dilakukan oleh kolonialis. Untuk melihat kenyataan historis, Van Leur menekankan penggunaan teori sosial dan ekonomi yang digagas oleh Max Weber. Sesuai dengan konteks zaman saat itu di abad 20, dunia sedang mengalami tiga kausal masalah umum, yakni masalah negara, rakyat, dan ekonomi. Hubungan ketiga unsur itu kemudian berujung pada perkembangan kapitalisme secara global (Wijaya, 2016). Perkembangan kapitalisme berpotensi untuk memposisikan salah satu pihak mendominasi pihak lain, dalam hal ini adalah terkait dengan hubungan antara kapitalis dengan monopoli sumber daya dan eksploitasi tenaga kerja. Di sisi yang lain, kapitalisme tidak hanya berbicara soal aktifitas perekonomian, kelompok yang dominan berpeluang besar mencampurkan segala pretensi dan kepentingannya untuk melanggengkan sistem yang telah dibangun (Arnold, 2005; Varga, 2014).

Untuk menelaah lebih jauh, konsep dari Immanuel Kant yang disebut sebagai categorical imperative dapat dipinjam sebagai perangkat untuk melakukan pekerjaan tersebut (Engstrom, 2009). Konsep ini dapat dipakai untuk melihat seberapa jauh pengaruh kebijakan-kebijakan kolonial di dalam menanamkan nilai-nilai yang dianggap murni dan memiliki nilai utama secara subjektif oleh mereka, namun di satu sisi cukup merugikan kaum bumiputera secara moral. Ada benturan-benturan kebudayaan yang secara sengaja dipertemukan oleh kolonialis untuk mendominasi atau bahkan meruntuhkan kebudayaan lainnya. Sebagai contoh misalnya, Frederick & Soeroto (2017) mengutip salah satu tulisan dalam pledoi Sukarno yang berjudul Indonesia Menggugat mengatakan:

“O, memang, zaman dulu feodal, zaman sekarang zaman modern. Kami bukan mau menghidupkan lagi zaman feodal itu; kami bukan pula mufakat dan cinta kepada aturan-aturan feodal itu. Kami mengetahui kejelekan-kejelekan bagi rakyat. Kami hanyalah menunjukkan kepada rakyat, bahwa feodalisme kami hari dulu itu adalah

feodalisme yang hidup, feodalisme yang tidak sakit-sakitan, feodalisme yang sehat dan bukan feodalisme yang penyakitan, -feodalisme yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan berkembang dan yang umpamanya, tidak diganggu hidupnya oleh imperialisme asing, niscaya bisa “meneruskan perjalanannya”, bisa “menyelesaikan revolusinya”, yakni niscaya bisa hamil dan akhirnya melahirkan suatu pergaulan hidup modern yang sehat pula!”.

Kutipan pernyataan Sukarno di atas menunjukkan adanya pengaruh yang dominan di dalam kehidupan masyarakat bumiputera sehingga nilai-nilai yang sebelumnya sudah ada kemudian terusik dan tercampuri oleh nilai-nilai yang barangkali sama sekali berbeda. Sukarno baranggapan bahwa sentral dari peradaban Indonesia adalah hasil dari aktifitas manusia Indonesia itu sendiri. Perspektif yang sama juga ditunjukkan oleh Van Leur yang mencoba untuk memunculkan peran kaum bumiputera dan meminimalisir peran Belanda di dalam tulisannya (van Leur, 2008). Hal demikian tentunya menjadi tonggak penting dalam merumuskan historiografi Indonesia yang berbeda dari perspektif kolonial. Secara tidak langsung dapat diambil pemaknaan sekaligus gambaran bahwa agensi di dalam narasi sejarah tidak berhenti kepada satu golongan atau satu kelompok saja.

Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi penanda kedaulatan politik bangsa Indonesia sekaligus sebagai babak baru dalam penulisan historiografi Indonesia. Perspektif nasional sudah mulai wacanakan, akan tetapi para penulis yang ada pada saat itu mayoritas dari mereka adalah sastrawan dan penyair yang masih pemikirannya masih lekat dengan semangat ideologis dan belum mengenal metode sejarah secara ilmiah. Akibatnya pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk menulis sebuah narasi sejarah di era tersebut masih belum terlalu populer meskipun wacana tentang nasionalisme sedang menguat di kalangan pemikir bumiputera (Nordholt, 2004).

Seminar Sedjarah I yang dilakukan pada tahun 1957 (Tim Penyusun Panitia Seminar Sejarah 1957, 2017) menjadi bukti keseriusan untuk merumuskan narasi sejarah Indonesia yang lebih ilmiah serta dapat mewakili perspektif masyarakat bumiputera yang selama bertahun-tahun ke belakang perannya terdegradasi oleh kepentingan perspektif kolonial. Dalam forum tersebut, beberapa tokoh tampak berambisi untuk mencurahkan gairah intelektualnya dalam merumuskan historiografi ini. Sorotan tajam tertuju pada perdebatan antara Moh. Yamin dengan Soedjatmoko seputar pokok-pokok filsafat sejarah. Yamin yang dipengaruhi pemikiran Ibnu Khaldun menulis tentang filsafat sejarah nasional dengan berporos pada asas-asas nasionalisme untuk membangun kesadaran kebangsaan. Sedangkan Soedjatmoko mengkritisi gagasan dari utopian past dengan nilai kolektif. Sebagai alternatif, ia menawarkan metode yang lebih ilmiah ketimbang berangan-angan dari sesuatu yang abstrak. Soedjatmoko melihat sejarah sebagaimana mestinya, bahwa sejarah secara umum tidak selalu berakar dari nasionalisme. Perbedaan pandangan semacam itulah yang kemudian melengkapi berbagai kebutuhan perspektif historiografi Indonesia.

Tidak boleh dilupakan pula peran begawan sejarah Indonesia, Sartono Kartodirdjo yang menawarkan rumusan sejarah-kritis dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial di dalam menjelaskan berbagai unit dari kejadian sejarah Indonesia. Gagasan Sartono untuk memberikan pembaharuan perspektif dalam historiografi Indonesia pada saat itu kemudian menciptakan diskursus-diskursus baru dengan munculnya berbagai alternatif tema sejarah, khususnya sejarah sosial yang dianggap sesuai untuk menjelaskan dinamika masyarakat Indonesia. Sartono berusaha untuk menggabungkan antara sifat dasar sejarah yang diakronis (memanjang dalam waktu) dengan sifat ilmu-ilmu sosial yang sinkronis (meluas dalam ruang) supaya narasi sejarah Indonesia bersifat holistik dan mampu mengakomodir gejala-gejala sejarah dari berbagai aspek kehidupan. Uraian-uraian yang diwacanakan oleh Sartono mengenai persoalan ini sangatlah penting mengingat kebutuhan fondasi historiografi Indonesiasentris pada saat itu masih belum dapat dirumuskan secara konkrit. Apabila kembali pada narasi historiografi prakemerdekaan yang sangat kental dengan unsur subjektifitas dan tema besarnya masih berkutat di dalam narasi sejarah politik, maka wacana yang diberikan oleh Sartono ini minimal meskipun belum bisa meruntuhkan sepenuhnya perspektif dan narasi sejarah politik-orang besar, minimal alternatif tema sejarah sosial ini dapat ‘mengimbangi’ narasi yang dominan.

Kemelut The Big Man dalam Historiografi Indonesia

Pasca tahun 1965 ketika runtuhnya rezim orde lama yang dipimpin oleh Sukarno dan lahirnya rezim orde baru (Vickers, 2005) kemudian memunculkan persoalan baru dengan menguatnya peran militer dalam narasi sejarah Indonesia (Crouch, 2007; Mc Gregor, 2008; Roosa, 2016). Superioritas rezim baru ini memberikan dampak yang cukup besar dalam corak sejarah Indonesia, karena salah satu cara mereka melakukan legitimasi kekuasaan yakni dengan memonopoli narasi sejarah sehingga interpretasi tentang sejarah bersifat lebih sentralistik (Harsutejo, 2010). Rezim yang dipimpin oleh Suharto ini kemudian membuat official history versi mereka sendiri yang dikemudian hari menuai berbagai kritik. Posisi dan peran militer tampak sangat menonjol. Berbagai kejadian-kejadian sejarah, khususnya di era kontemporer (mulai zaman Jepang) digambarkan secara kronologis dan juga ‘dramatis’ dengan perspektif militesentrisnya. Selain narasi sejarah, pemerintah di rezim ini sangat rajin menciptakan instrumen dalam melanggengkan kepentingan politik memori seperti pembuatan museum, monumen, film, hari peringatan yang menonjolkan peran-peran golongan tertentu.

Jika kembali kepada wacana yang ditawarkan Sartono seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tampak sekali bahwa orientasi Sartono untuk menggambarkan sejarah Indonesia secara utuh masih belum dapat terwujud selama era rezim orde baru berkuasa. Peralnya, sejarawan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menulis buku babon sejarah nasional Indonesia masih sarat dengan tendensi dan kepentingan politik. Membangun narasi besar dengan memposisikan orang-orang besar di dalam

historiografi Indonesia seolah-olah menenggelamkan peran-peran masyarakat kecil. Meminjam konsep dari Hobsbawm (1971) yang mengatakan bahwa perjalanan sejarah merupakan aktifitas dari korporasi antar komunitas masyarakat atau yang disebut sebagai *Gemeinschaft-Gessellschaft*. Posisi masyarakat yang berada di luar wilayah kekuasaan sangat tidak tampak akibat dominasi narasi peran orang-orang besar sehingga agensi di dalam sejarah menjadi terbatas. Secara umum, pemahaman sejarah publik dikontrol penuh oleh otoritas penguasa yang 'memaksakan' untuk dipercayai sebagai narasi tunggal.

Sektor lain yang menjadi sasaran indoktrinasi politik memori orde baru adalah pembelajaran sejarah. Buku teks yang digunakan oleh siswa di dalam mempelajari sejarah merupakan salah satu bentuk lain dari historiografi dalam ranah pendidikan formal (Mahardika, 2020). Narasi yang disajikan kepada siswa di dalam buku teks merupakan turunan dari buku babon Sejarah Nasional Indonesia yang diterbitkan dalam beberapa jilid. Buku babon ini ditulis oleh Nugroho Notosusanto, seorang sejarawan militer yang 'disponsori' oleh negara untuk dalam buku tersebut. Muatan yang terkandung dalam buku teks siswa juga sarat dengan narasi sejarah politik. Bahkan di dalam beberapa diskusi, juga disebutkan bahwa semasa orde baru pembelajaran sejarah diberikan dengan pendekatan emosional seperti misalnya menerapkan model pembelajaran sosio-drama pada materi tertentu untuk memposisikan siswa dalam situasi kesejarahan. Belum lagi pendekatan yang digunakan dalam mempelajari sejarah masih bersifat satu arah, artinya guru menjadi satu-satunya sumber belajar, dan buku teks menjadi 'kitab suci' yang patut dipercayai sepenuhnya oleh siswa. Cara-cara inilah yang digunakan oleh pemerintah orde baru di dalam melakukan indoktrinasi sebagai sebuah harga yang harus dibayar untuk melanggengkan legitimasi kekuasaannya.

Peranan tokoh-tokoh besar yang tampak dominan membuat corak narasi sejarah di masa ini tidak jauh berbeda dari masa kolonial. Dalam praktiknya, repesifitas kepada perspektif yang berbeda dari narasi resmi pemerintah cukup masif. Beberapa buku ataupun tulisan mengenai sejarah yang versinya berlawanan dibredel dan dilarang untuk terbit (Harsutejo, 2010). Monodimensionalitas tampak jelas dari narasi sejarah yang disusun dengan memposisikan orang-orang penting beserta peranannya dalam peristiwa sejarah. Apa yang dicita-citakan oleh Sartono dalam mengembangkan narasi sejarah-kritis mandek untuk sementara waktu karena berbenturan dengan kepentingan pemerintah. Berbagai studi tentang sejarah politik merupakan menu utama yang seolah-olah hanya boleh ditulis oleh pemerintah. Masyarakat kecil kehilangan narasinya sendiri di dalam sejarah. Maka, proyek de-kolonisasi historiografi Indonesia yang diakronis dan sinkronis harus mengalami kemacetan dalam kurun waktu 32 tahun selama orde baru berkuasa.

Pasca runtuhnya orde baru, studi-studi tentang berbagai kejanggalan sejarah mulai kembali dilakukan. Seiring dengan pergantian rezim dan terbukanya berbagai informasi mengenai masa lalu, membuat publik pada umumnya, dan khususnya para

akademisi serta sejarawan mencoba menelaah dan mempertanyakan kembali objektivitas berbagai versi peristiwa sejarah yang ditulis di masa orde baru. Beberapa usaha dilakukan oleh LSM dan penulis secara individu untuk menggali dan mencoba menafsirkan kembali apa yang dianggap salah dalam narasi sejarah versi orde baru. Hal ini sekaligus meneruskan pekerjaan rumah yang cukup besar dalam proyek de-kolonisasi historiografi Indonesia untuk mengungkap berbagai gejala sejarah Indonesia dalam berbagai perspektif dan aspek. De-kolonisasi historiografi ini merupakan satu semangat untuk apa yang disebut oleh Kuntowijoyo (2003) sebagai “pribumisasi sejarah” Indonesia. Tentu dalam melakukan pekerjaan ini terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi.

Tantangan De-Kolonisasi Historiografi Indonesia

De-kolonisasi dalam arti sempit dapat dimaknai sebagai pembongkaran sesuatu yang kolonial dan mengutamakan sesuatu yang lokal. Tujuan dari de-kolonisasi adalah untuk menunjukkan signifikansi antara narasi sejarah masa kolonial dengan narasi sejarah bangsa yang telah merdeka. Tentu saja pekerjaan ini bukan pekerjaan yang hanya sekedar membolak-balikkan perspektif semata. Seperti misalnya, Pangeran Diponegoro dianggap pemberontak oleh orang-orang Belanda, dan dianggap pahlawan oleh orang Indonesia, tidak hanya itu. Persoalannya adalah, de-kolonisasi ini dilakukan untuk tujuan apa dan bagaimana caranya? Secara ideal, de-kolonisasi merupakan upaya untuk mengkritik dan membongkar sesuatu yang dominan dan kembali kepada sesuatu yang dasar (Smith, 1999). Dominasi narasi kolonial yang mendegradasi peran dan karakter masyarakat bumiputera harus dikembalikan dalam signifikansi narasinya untuk memberikan penanaman identitas.

Persoalan nasionalitas-ideologis ini tampaknya perlu ditinjau kembali dalam melakukan de-kolonisasi historiografi Indonesia. Pekerjaan ini dapat dimulai dengan mencoba menelaah kembali maksud dan tujuan tulisan Moh. Yamin tentang filsafat sejarah nasional, serta kembali kepada narasi yang dibangun oleh Moh. Ali dengan bukunya yang berjudul Pengantar Sejarah Indonesia. Dua tulisan itu mungkin dapat memberikan semangat nasionalitas dalam merangkai narasi sejarah yang berbeda dari narasi kolonial, terlepas dari unsur subjektivitas di dalamnya. Yamin dan Ali memiliki hasrat yang cukup tinggi untuk menanamkan pemahaman identitas nasional. Nilai-nilai yang tersirat di dalam tulisannya minimal dapat memberikan gambaran untuk “menulis sejarah dengan tujuan”, dan tidak ada problem bagi kita apabila Indonesiasentris digaungkan untuk mencapai tujuan itu. Sedangkan dalam tataran metode, tampaknya tidak ada sesuatu yang berbeda. Hanya saja perlu diteliti kembali apabila menggunakan sumber-sumber yang diproduksi pada masa pemerintah kolonial supaya historiografi Indonesia mendapatkan perspektif yang semestinya. Maka yang dapat membedakan antara narasi kolonial dengan Indonesiasentris adalah persoalan penafsiran. Tentu, hal ini tetap berpegang pada asas faktual-objektif sehingga penafsiran tentang sejarah dapat

memiliki nilai dan memberikan kebermaknaan bagi siapapun yang membacanya (Lohanda, 2019; Nordholt dkk., 2013).

Beberapa penjelasan pada subab sebelumnya juga menunjukkan tantangan yang serius dalam usaha de-kolonisasi ini. Seperti yang terjadi pada masa orde baru ketika narasi sejarah dimonopoli oleh penguasa, yang secara etika tidak jauh berbeda dari masa kolonial. Tantangan-tantangan dari dalam ini yang kemudian menjadi persoalan yang harus segera diatasi apabila menginginkan narasi sejarah yang analitis-kritis. Kesadaran setiap akademisi maupun sejarawan dalam menulis narasi yang objektif tentunya juga turut berpengaruh terhadap arah perkembangan proyek de-kolonisasi historiografi ke depan. Barangkali dalam hal ini, peran negara juga diperlukan untuk mendukung pembuatan narasi sejarah yang berpihak kepada berbagai agensi di dalam narasi sejarah itu sendiri. Sehingga narasi sejarah tidak lagi dimonopoli oleh pihak tertentu, dan agensi di dalam sejarah menjadi semakin luas. Ketika hal semacam ini dapat dilakukan dengan baik, maka narasi historiografi Indonesiasentris yang diidam-idamkan 63 tahun silam dapat terwujud sehingga masyarakat Indonesia dapat memahami identitas mereka secara utuh dari berbagai aspek kehidupan.

Kesimpulan

Narasi sejarah Indonesia memiliki corak yang berbeda-beda dari masa ke masa. Corak penulisan sejarah secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh kepentingan penguasa. Historiografi kolonial yang mendegradasi peran masyarakat bumiputera kembali dipersoalkan. Membongkar perspektif kolonial dan mengutamakan perspektif yang lebih nasional merupakan proyek yang harus dikerjakan untuk membangun narasi sejarah yang lebih nasional dan independen. Dalam melakukan pekerjaan itu, dibutuhkan kebesaran hati untuk tidak “mengambil peran” yang dominan dalam melukiskan sejarah Indonesia yang holistik. Kekuasaan kolonial yang sudah hilang hendaknya dapat dimanfaatkan untuk membangun narasi sejarah Indonesia yang mengakomodir semua agen yang turut berperan dalam perjalanan sejarah bangsa. Tidak perlu melakukan sentralisasi agen sejarah dengan menempatkan peran golongan tertentu dan menutup peran golongan yang lain.

Daftar Rujukan

- Ali, M R. (2005). *Pengantar ilmu sejarah Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Arnold, D. (2005). Europe, technology, and colonialism in the 20th century. *History and Technology*, 21(1), 85–106.
- Carr, E. H. (2018). *What is history?*. UK: Penguin. Retrived from <<https://www.penguin.co.uk/books/135/13521/what-is-history-/9780141010205.html>>
- Crouch, H. (2007). *The army and politics in Indonesia (1st Equinox ed)*. Jakarta: Equinox Pub.
- Engstrom, S. P. (2009). *The Form of Practical Knowledge: A Study of The Categorical Imperative*. Cambridge: Harvard University Press.

- Epstein, T. (2009). *Interpreting national history: race, identity, and pedagogy in classrooms and communities*. New York: Routledge.
- Frederick, W. H., & Soeroto, S. (2017). *Pemahaman sejarah Indonesia: Sebelum dan sesudah revolusi*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Harsutejo. (2010). *Kamus kejahatan orba: cinta tanah air dan bangsa (Cet. 1)*. Depok: Komunitas Bambu.
- Heater, D. (2003). *A History of education for citizenship (1 ed.)*. New York: Routledge.
- Hobsbawm, E. J. (1971). From social history to the history of society. *Daedalus*, 100(1), 20–45.
- Holland, A. (Ed.). (1985). *Philosophy, its history and historiography*. D. Reidel Pub. Co.; Sold and distributed in the U.S.A. and Canada by Kluwer Academic Publishers.
- Kartodirdjo, S. (2014). *Pemikiran dan perkembangan historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi sejarah (Ed. 2)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar ilmu sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Kuntowijoyo. (2008). *Penjelasan sejarah: Historical Explanation (Cet. 1)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lohanda, M. (2019). *Membaca sumber menulis sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Lubis, M. (2013). *Manusia Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mahardika, M. D. G. (2020). Kepentingan rezim dalam buku teks sejarah di sekolah. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 16(1), 1–7.
- Murphey, M. G. (2009). *Truth and history*. Albany: SUNY Press.
- Nordholt, H. S. (2004). *De-colonising indonesian historiography*. Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University.
- Nordholt, H. S., Purwanto, B., & Saptari, R. (2013). *Perspektif baru penulisan sejarah Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Roosa, J. (2016). *Dalih pembunuhan massal: gerakan 30 september dan kudeta Suharto*. Yogyakarta: Kendi.
- Smith, L. T. (1999). *Decolonizing methodologies: research and indigenous peoples*. Zed Books ; University of Otago Press ; Distributed in the USA exclusively by St. Martin's Press.
- Tim Penyusun Panitia Seminar Sejarah 1957. (2017). *Laporan Seminar Sejarah: 14-18 Desember 1957 di Yogyakarta*. Yogyakarta: Ombak.
- van Leur, J. C. (2008). *Indonesian trade and society: essays in Asian social and economic history*. New York: American Council of Learned Societies.
- Varga, E. (2014). Twentieth century capitalism. *Problems in Economics*, 3(1), 48–62.
- Vickers, A. (2005). *A History of modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Wijaya, D. N. (2016). Napak tilas perspektif Indonesiasentris Jacob Cornelis Van Leur. *Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 10(1), 29–44.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.